

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 2 TAHUN 1998 (2/1998)  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 20.123.100.000.000,00 (dua puluh triliun seratus dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah);
  - b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

## Pasal 2

- (1) Bertambahnya Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp 648.300.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
  - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 20.236.700.000.000,00 (dua puluh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
  - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak bertambah dengan Rp 534.700.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Bantuan Program sebesar nihil;
  - b. Bantuan Proyek bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

## Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (2) Bertambahnya Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 22.447.432.000.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
  - b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp 8.010.426.000.000,00 (delapan triliun sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 2.780.574.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
  - b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 10.791.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

## Pasal 4

- (1) Bertambahnya Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	Rp
3.739.033.000,00		
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	Rp
14.242.557.000,00		
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	Rp
4.120.484.000,00		
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	Rp
5.346.018.000,00		
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	Rp
24.632.435.652.000,00		
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	Rp
8.224.544.000,00		
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	Rp
767.111.000,00		
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	Rp
4.697.771.000,00		
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	Rp
1.667.970.898.000,00		
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	Rp
1.525.300.000,00		
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	Rp
179.415.040.000,00		
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	Rp
32.534.662.000,00		
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan	Rp
7.953.841.000,00		
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	Rp
2.095.996.000,00		

15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	Rp	
	87.222.259.000,00		
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	Rp	
	13.730.778.000,00		
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	Rp	
	44.575.659.000,00		
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	Rp	
	505.770.073.000,00		
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	Rp	
	660.390.694.000,00		
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	Rp	315.250.660.000,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	Rp	
	306.201.000.000,00		
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	Rp	
	515.597.000.000,00		
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	Rp	
	479.236.000.000,00		
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	Rp	
	57.182.000.000,00		
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan	Rp	
	34.271.000.000,00		
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	Rp	
	712.172.000.000,00		
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	Rp	
	302.383.000.000,00		
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN		

	TELEKOMUNIKASI	
	berkurang dengan	
Rp		31.605.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	
	berkurang dengan	
Rp		416.523.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	berkurang dengan	
Rp		76.730.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	berkurang dengan	
Rp		489.860.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	
	berkurang dengan	
Rp		151.554.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	berkurang dengan	
Rp		164.929.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	berkurang dengan
Rp		132.199.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA	
	berkurang dengan	
Rp		64.442.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	
	berkurang dengan	
Rp		153.125.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM	
	berkurang dengan	
Rp		58.323.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	
	berkurang dengan	
Rp		164.646.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	berkurang dengan	
Rp		48.842.000.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	berkurang dengan	
Rp		64.350.000.000,00

(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam

subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(5) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari :

	(dalam rupiah)
01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan Rp 391.077.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan Rp 528.973.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan Rp 971.014.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan Rp 61.819.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan Rp 243.048.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan Rp 3.224.441.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan Rp 2.393.048.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan Rp 705.882.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan Rp 169.994.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan Rp 42.476.000.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan Rp 488.160.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA bertambah dengan

Rp 6.424.000.000,00  
13SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,  
KESEHATAN, PERANAN WANITA,  
ANAK DAN REMAJA  
bertambah dengan  
Rp 215.233.000.000,00  
14SEKTOR PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN  
bertambah dengan  
Rp 905.499.000.000,00  
15SEKTOR AGAMA  
bertambah dengan  
Rp 15.133.000.000,00  
16SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI  
bertambah dengan  
Rp 88.333.000.000,00  
17SEKTOR HUKUM  
bertambah dengan  
Rp 274.000.000,00  
18SEKTOR APARATUR NEGARA DAN  
PENGAWASAN  
bertambah dengan  
Rp 49.537.000.000,00  
19SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN  
LUAR NEGERI, PENERANGAN,  
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA  
bertambah dengan  
Rp 31.578.000.000,00  
20SEKTOR PERTAHANAN DAN  
KEAMANAN  
bertambah dengan  
Rp 259.057.000.000,00

(6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

#### Pasal 5

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.

(2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad

Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada  
tanggal 13 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 65

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahunkeempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1997/1998, realisasi Pendapatan Negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya Pendapatan Negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan. Penerimaan Dalam Negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya. Sedangkan lebih tingginya Penerimaan Pembangunan terutama berkaitan dengan adanya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Di sisi Belanja Negara, realisasi Pengeluaran Rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya Pengeluaran Rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta Pengeluaran Rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi Pengeluaran Pembangunan diperkirakan juga lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembiayaan pembangunan yang berasal dari Bantuan Proyek.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dengan demikian terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

(dalam rupiah)

PENERIMAAN PERPAJAKAN

berkurang dengan

648.300.000.000,00

0110 Pajak Penghasilan (Pph)

berkurang dengan

659.517.000.000,00

0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

berkurang dengan

100.383.000.000,00

0140 Pajak Bumi dan Bangunan dan (PBB)

bertambah dengan

150.016.000.000,00

0210 Penerimaan Bea Masuk

berkurang dengan

332.198.000.000,00

0220 Penerimaan Cukai bertambah dengan

370.881.000.000,00

0230 Penerimaan Pajak Ekspor/pungutan

ekspor bertambah dengan

25.391.000.000,00

0240 Bea Meterai berkurang dengan

80.490.000.000,00

0250 Bea lelang berkurang dengan

22.000.000.000,00

Huruf b

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI

DAN GAS ALAM bertambah dengan

20.236.700.000.000,00

0310 Penerimaan minyak bumi dan

gas alam bertambah dengan

20.485.900.000.000,00

0320 Penerimaan laba bersih minyak

(LBM) berkurang dengan

249.200.000.000,00

Huruf c

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

bertambah dengan

534.700.000.000,00

0410 Penerimaan pendidikan

bertambah dengan

19.038.600.000,00

0411 Uang pendidikan

bertambah dengan

18.959.900.000,00

0412 Uang ujian masuk, kenaikan

tingkat, dan akhir pendidikan

bertambah dengan

13.800.000,00

0413 Uang ujian untuk menjalankan

praktek bertambah dengan

2.700.000,00

0414 Penerimaan pendidikan lainnya

bertambah dengan

62.200.000,00

0480 Penerimaan pendidikan swadana

bertambah dengan

23.048.100.000,00

0481 Penerimaan pendidikan

swadana bertambah dengan

23.048.100.000,00

0510 Penjualan hasil produksi, sitaan

bertambah dengan

493.500.000,00

0511 Penjualan hasil pertanian,

perkebunan bertambah dengan

72.100.000,00

0512 Penjualan hasil perternakan

berkurang dengan

548.100.000,00

0513 Penjualan hasil perikanan

bertambah dengan

13.900.000,00

0514 Penjualan hasil sitaan

bertambah dengan

240.000.000,00

0515 Penjualan obat-obatan dan

hasil farmasi lainnya

bertambah dengan

5.100.000,00

0516 Penjualan penerbitan, film,

dan hasil cetakan lainnya

bertambah dengan

24.600.000,00

0517 Penjualan dokumen-dokumen

pelelangan bertambah dengan  
 407.300.000,00  
 0519 Penjualan lainnya  
 bertambah dengan  
 278.600.000,00

0520 Penjualan aset tetap bertambah dengan  
 460.900.000,00  
 0521 Penjualan rumah, gedung,  
 bangunan, dan tanah  
 bertambah dengan  
 39.300.000,00  
 0522 Penjualan kendaraan bermotor  
 bertambah dengan  
 12.800.000,00  
 0523 Penjualan sewa beli  
 bertambah dengan  
 386.900.000,00  
 0529 Penjualan aset lainnya yang  
 berlebih, rusak, dihapuskan  
 bertambah dengan  
 21.900.000,00

0530 Penerimaan sewa bertambah dengan  
 118.500.000,00  
 0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri  
 berkurang dengan  
 98.000.000,00  
 0532 Sewa gedung, bangunan, gudang  
 berkurang dengan  
 800.000,00  
 0533 Sewa benda-benda bergerak  
 bertambah dengan  
 160.200.000,00  
 0539 Sewa benda-benda tak bergerak  
 lainnya bertambah dengan  
 57.100.000,00

0540 Penerimaan jasa I bertambah dengan  
 41.462.200.000,00  
 0541 Penerimaan rumah sakit dan  
 instansi kesehatan lainnya  
 bertambah dengan  
 1.737.600.000,00  
 0542 Penerimaan tempat hiburan/  
 taman/museum bertambah dengan  
 115.000.000,00  
 0543 Penerimaan surat keterangan,  
 visa, paspor dan SIM, STNK,  
 BPKB berkurang dengan  
 19.146.600.000,00  
 0544 Penerimaan sertifikat  
 pendaftaran tanah  
 bertambah dengan

22.854.000.000,00  
     0545 Penerimaan hak dan perizinan  
         bertambah dengan  
 32.915.300.000,00  
     0546 Penerimaan sensor/karantina,  
         pengawasan, pemeriksaan  
         bertambah dengan  
     392.200.000,00  
     0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa  
         pekerja bertambah dengan  
     291.300.000,00  
     0548 Penerimaan jasa Kantor Urusan  
         Agama bertambah dengan  
     333.400.000,00  
     0549 Penerimaan jasa bandar udara  
         dan pelabuhan  
         bertambah dengan  
     1.970.000.000,00  
  
 0550 Penerimaan Jasa II  
     bertambah dengan  
 56.437.300.000,00  
     0551 Penerimaan jasa lembaga  
         keuangan (jasa giro)  
         berkurang dengan  
     7.006.500.000,00  
     0552 Penerimaan iuran hasil hutan,  
         hasil laut, royalti dan  
         denda bertambah dengan  
     62.901.100.000,00  
     0553 Penerimaan iuran lelang  
         untuk fakir miskin  
         berkurang dengan  
     760.600.000,00  
     0554 Penerimaan jasa Kantor Catatan  
         Sipil berkurang dengan  
     4.345.600.000,00  
     0555 Penerimaan biaya penagihan  
         pajak-pajak negara dengan  
         surat paksa bertambah dengan  
     35.000.000,00  
     0556 Penerimaan  
     pewarganegaraan  
         bertambah dengan  
     125.000.000,00  
     0557 Pendapatan bea lelang  
         bertambah dengan  
     1.915.200.000,00  
     0558 Pendapatan biaya pengurusan  
         piutang negara dan lelang  
         negara berkurang dengan  
     10.999.900.000,00  
     0559 Penerimaan jasa lainnya  
         bertambah dengan

uang

14.573.600.000,00

- 0560 Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan  
3.860.300.000,00
  - 0561 Bea visa dan paspor berkurang dengan  
1.995.000.000,00
  - 0562 Bea konsuler berkurang dengan  
2.367.100.000,00
  - 0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan bertambah dengan  
57.000.000,00
  - 0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan  
8.165.400.000,00
  
- 0580 Penerimaan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana bertambah dengan  
75.731.100.000,00
  - 0581 Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan  
539.500.000,00
  - 0582 Penerimaan sewa swadana bertambah dengan  
900.000,00
  - 0583 Penerimaan jasa swadana bertambah dengan  
75.190.700.000,00
  
- 0610 Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan bertambah dengan  
27.408.900.000,00
  - 0611 Legilisasi tanda tangan bertambah dengan  
1.600.000,00
  - 0612 Pengesahan surat di bawah bertambah dengan  
200.000,00
  - 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan bertambah dengan  
3.186.800.000,00
  - 0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan  
13.600.000.000,00
  - 0615 Ongkos perkara bertambah dengan  
1.974.100.000,00
  - 0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan

8.646.200.000,00			
0710 Penerimaan dari investasi bertambah dengan			
128.193.300.000,00			
0711 Bagian laba dari BUMN bertambah dengan			
128.193.300.000,00			
0810 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Berjalan bertambah dengan			
22.607.500.000,00			
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai                    pusat	bertambah		dengan
2.028.900.000,00			
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan			
3.030.000.000,00			
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan			
60.000.000,00			
0814 Penerimaan kembali belanja rutin                    lainnya	bertambah		dengan
16.089.400.000,00			
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya			
369.500.000,00			
bertambah dengan			
1.285.400.000,00			
0816 Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh) bertambah dengan			
113.800.000,00			
0820 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran lalu bertambah dengan			
13.834.700.000,00			
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat berkurang dengan			
368.800.000,00			
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan			
12.739.000.000,00			
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan			
1.376.900.000,00			
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan			
44.200.000,00			

0825 Penerimaan kembali belanja  
pembangunan rupiah lainnya  
bertambah dengan  
33.900.000,00

0826 Pembedaan pembayaran pembukuan  
subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh)  
bertambah dengan  
9.500.000,00

0880 Penerimaan Lain-lain Swadana  
bertambah dengan  
9.713.800.000,00

0881 Penerimaan lain-lain swadana  
bertambah dengan  
9.713.800.000,00

0890 Penerimaan Lain-lain  
bertambah dengan  
112.291.300.000,00

0891 Penerimaan kembali persekot,  
uang muka gaji  
bertambah dengan  
7.500.000,00

0892 Penerimaan denda keterlambatan  
penyelesaian pekerjaan  
bertambah dengan  
47.900.000,00

0893 Penerimaan kembali, ganti rugi  
atas kerugian yang diderita  
oleh negara bertambah dengan  
56.400.000,00

0894 Penerimaan kembali berhitungan  
sisa lebih subsidi gaji PNS-DO  
berdasarkan SPM nihil KPKN  
bertambah dengan  
106.000.000.000,00

0899 Penerimaan anggaran lainnya  
bertambah dengan  
6.179.500.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)



Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN RUTIN

bertambah dengan

22.447.432.000.000,00

01 SEKTOR INDUSTRI

berkurang dengan

3.739.033.000,00

01.1 Subsektor Industri

berkurang dengan

3.739.033.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN

KEHUTANAN

dengan 14.242.557.000,00

bertambah

02.1 Subsektor Pertanian

berkurang dengan

6.957.443.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan

bertambah dengan

21.200.000.000,00

03 SEKTOR

PENGAIRAN

berkurang			
	4.120.484.000,00	dengan	
		03.1 Subsektor	
Pengembangan			
	2.189.874.000,00	Sumber Daya Air	
		berkurang dengan	
		03.2 Subsektor Irigasi	
		berkurang dengan	
	1.930.610.000,00		
		04 SEKTOR TENAGA KERJA	
		berkurang dengan	
	5.346.018.000,00		
		04.1 Subsektor	Tenaga
Kerja			
		berkurang dengan	
	5.346.018.000,00		
		05 SEKTOR PERDAGANGAN,	
		PENGEMBANGAN	USAHA
NASIONAL,			
		KEUANGAN DAN KOPERASI	
		bertambah dengan	
	24.632.435.652.000,00		
		05.1 Subsektor	
Perdagangan			
		Dalam	Negeri
berkurang			
		dengan	
	6.579.037.000,00		
		05.2 Subsektor	
Perdagangan			
		Luar	Negeri
berkurang			
		dengan	
	4.616.232.000,00		
		05.4 Subsektor Keuangan	
		bertambah	dengan
	24.648.165.130.000,00		
		05.5 Subsektor	Koperasi
dan			
		Pengusaha Kecil	
		berkurang dengan	
	4.534.209.000,00		
		06 SEKTOR	TRANSPORTASI,
METEOROLOGI			
		DAN GEOFISIKA	berkurang
	8.224.544.000,00		dengan
		06.1 Subsektor Prasarana Jalan	
		berkurang dengan	
	3.363.092.000,00		

	06.2 Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan		
2.685.446.000,00			
	06.3 Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan		
99.388.000,00			
	06.4 Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan		
1.237.177.000,00			
	06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan		
839.441.000,00			
	07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan		
767.111.000,00			
	07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan		
237.956.000,00			
	07.2 Subsektor Energi berkurang dengan		
529.155.000,00			
	08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan		
4.697.771.000,00			
	08.1 Subsektor Pariwisata berkurang dengan		
713.789.000,00			
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan		
5.411.560.000,00			
	09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan		
1.667.970.898.000,00			
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	berkurang	dengan
1.663.632.000.000,00			
	09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan		
4.338.898.000,00			
	10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan		
1.525.300.000,00			
	10.1 Subsektor		Lingkungan
Hidup			

berkurang dengan  
 930.775.000,00  
 10.2 Subsektor Tata Ruang  
 berkurang dengan  
 594.525.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
 NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP  
 TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA  
 DAN  
 OLAH RAGA berkurang dengan  
 179.415.040.000,00  
 11.1 Subsektor Pendidikan  
 berkurang dengan  
 147.281.178.000,00  
 11.2 Subsektor Pendidikan Luar  
 Sekolah dan Kedinasan  
 berkurang dengan  
 20.774.351.000,00  
 11.3 Subsektor Kebudayaan  
 Nasional dan Kepercayaan  
 Terhadap Tuhan Yang Maha  
 Esa berkurang dengan  
 10.260.485.000,00  
 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah  
 Raga berkurang dengan  
 1.099.026.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN  
 KELUARGA SEJAHTERA berkurang  
 dengan  
 32.534.662.000,00  
 12.1 Subsektor Kependudukan  
 dan Keluarga Berencana  
 berkurang dengan  
 32.534.662.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,  
 KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK  
 DAN REMAJA bertambah dengan  
 7.953.841.000,00  
 13.1 Subsektor Kesejahteraan  
 Sosial berkurang dengan  
 772.083.000,00  
 13.2 Subsektor Kesehatan  
 bertambah dengan  
 8.725.924.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN  
 PERMUKIMAN berkurang dengan  
 2.095.996.000,00  
 14.1 Subsektor Perumahan dan  
 Permukiman berkurang  
 dengan 1.357.095.000,00

	14.2 Subsektor	Penataan	Kota
dan	Bangunan berkurang dengan		
738.901.000,00			
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan		
87.222.259.000,00			
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan		
7.267.478.000,00			
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan		
79.954.781.000,00			
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan		
13.730.778.000,00			
16.2	Subsektor		Ilmu
Pengetahuan			
	Terapan dan Dasar berkurang dengan		
10.022.814.000,00			
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan		
489.754.000,00			
16.5	Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan		
221.418.000,00			
16.6	Subsektor		Sistem
Informasi			
	dan Statistik berkurang dengan		
2.996.792.000,00			
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan		
44.575.659.000,00			
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	berkurang	dengan
36.185.507.000,00			
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan		
8.390.152.000,00			
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan		
505.770.073.000,00			
18.1	Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan		
487.738.270.000,00			

18.2 Subsektor Pendayagunaan  
Sistem dan Pelaksanaan  
Pengawasan  
dengan 18.031.803.000,00

berkurang

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR  
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI  
DAN MEDIA MASSA bertambah  
dengan  
660.390.694.000,00  
19.1 Subsektor Politik  
berkurang dengan  
5.305.087.000,00  
19.2 Subsektor Hubungan Luar  
Negeri bertambah dengan  
687.765.141.000,00  
19.3 Subsektor Penerangan,  
Komunikasi dan Media  
Massa  
berkurang dengan  
22.069.360.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
berkurang dengan  
315.250.660.000,00  
20.2 Subsektor Angkatan  
Bersenjata Republik  
Indonesia  
berkurang dengan  
268.913.426.000,00  
20.3 Subsektor Pendukung  
berkurang dengan  
46.337.234.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH (dalam  
rupiah)

berkurang dengan  
2.780.574.000.000,00  
01 SEKTOR INDUSTRI  
bertambah dengan  
306.201.000.000,00  
01.1 Subsektor Industri  
bertambah dengan  
306.201.000.000,00  
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
bertambah dengan  
515.597.000.000,00

519.354.000.000,00	02.1 Subsektor Pertanian bertambah dengan		
3.757.000.000,00	02.2 Subsektor Kehutanan berkurang dengan		
479.236.000.000,00	03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan		
92.693.000.000,00	03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan		
386.543.000.000,00	03.2 Subsektor Irigasi berkurang dengan		
57.182.000.000,00	04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan		
57.182.000.000,00	04.1 Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan		
34.271.000.000,00	05 SEKTOR PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan	PERDAGANGAN,	
3.411.000.000,00	05.1 Subsektor Dalam Negeri bertambah dengan	Perdagangan	
1.810.000.000,00	05.2 Subsektor Luar Negeri berkurang dengan	Perdagangan	
1.200.000.000,00	05.3 Subsektor Usaha Nasional	Pengembangan	berkurang dengan
1.564.000.000,00	05.4 Subsektor Keuangan berkurang dengan		
33.108.000.000,00	05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha kecil berkurang dengan		
712.172.000.000,00	06 SEKTOR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	TRANSPORTASI,	berkurang dengan

	06.1 Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	
475.725.000.000,00		
	06.2 Subsektor	Transportasi
Darat		
	berkurang dengan	
102.683.000.000,00		
	06.3 Subsektor	Transportasi
Laut		
	berkurang dengan	
70.987.000.000,00		
	06.4 Subsektor	Transportasi
Udara		
	berkurang dengan	
55.031.000.000,00		
	06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	
7.746.000.000,00		
	07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	
302.383.000.000,00		
	07.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan	
29.345.000.000,00		
	07.2 Subsektor Energi berkurang dengan	
273.038.000.000,00		
	08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	
31.605.000.000,00		
	08.1 Subsektor Pariwisata berkurang dengan	
18.050.000.000,00		
	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	
13.555.000.000,00		
	09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	
416.523.000.000,00		
	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	
74.800.000.000,00		
	09.2 Subsektor	Transmigrasi
dan		
	Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan	
491.323.000.000,00		



10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan			
76.730.000.000,00				
	10.1 Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan			
54.195.000.000,00				
	10.2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan			
22.535.000.000,00				
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA	ESA,	PEMUDA	
DAN				
	OLAH RAGA berkurang dengan			
489.860.000.000,00				
	11.1 Subsektor Pendidikan berkurang dengan			
393.520.000.000,00				
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan			
46.231.000.000,00				
	11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan			
27.565.000.000,00				
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan			
22.544.000.000,00				
12	SEKTOR	KEPENDUDUKAN	DAN	
KELUARGA				
	SEJAHTERA berkurang dengan			
151.554.000.000,00				
	12.1 Subsektor		Kependudukan	
dan				
	Keluarga Berencana berkurang dengan			
151.554.000.000,00				
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan			
164.929.000.000,00				
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan			
28.421.000.000,00				
	13.2 Subsektor Kesehatan berkurang dengan			
116.824.000.000,00				
	13.3 Subsektor Peranan Wanita,			

Anak dan Remaja  
berkurang dengan  
76.526.000.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN

berkurang dengan  
132.199.000.000,00  
14.1 Subsektor Perumahan dan  
Permukiman berkurang  
dengan  
125.345.000.000,00  
14.2 Subsektor Penataan Kota  
dan Bangunan berkurang  
dengan  
6.854.000.000,00

15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan  
64.442.000.000,00

15.1 Subsektor Pelayanan  
Kehidupan Beragama  
berkurang dengan  
11.458.000.000,00  
15.2 Subsektor Pembinaan  
Pendidikan Agama  
berkurang dengan  
52.984.000.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI berkurang dengan  
153.125.000.000,00  
16.1 Subsektor Teknik Produksi  
dan Teknologi berkurang  
dengan  
21.607.000.000,00

16.2 Subsektor Ilmu  
Pengetahuan

Terapan dan Dasar  
berkurang dengan  
17.193.000.000,00  
16.3 Subsektor Kelembagaan  
Prasarana dan Sarana Ilmu  
Pengetahuan dan Teknologi  
berkurang dengan  
31.417.000.000,00

16.4 Subsektor kelautan  
berkurang dengan  
19.141.000.000,00  
16.5 Subsektor Kedirgantaraan  
berkurang dengan  
11.416.000.000,00

16.6 Subsektor Sistem  
Informasi dan Statistik

berkurang dengan  
52.351.000.000,00

17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan  
58.323.000.000,00

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum  
Nasional berkurang dengan  
4.773.000.000,00

17.2 Subsektor Pembinaan  
Aparatur Hukum berkurang dengan  
15.520.000.000,00

17.3 Subsektor Sarana dan  
Prasarana Hukum berkurang  
dengan  
38.030.000.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN  
PENGAWASAN berkurang dengan  
164.646.000.000,00

18.1 Subsektor Aparatur Negara  
berkurang dengan  
158.745.000.000,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan  
Sistem dan Pelaksanaan  
Pengawasan berkurang  
dengan 5.901.000.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR  
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI  
DAN MEDIA MASSA berkurang  
dengan 48.842.000.000,00

19.1 Subsektor Politik  
berkurang dengan  
6.000.000.000,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar  
Negeri berkurang dengan  
2.199.000.000,00

19.3 Subsektor Penerangan,  
Komunikasi dan Media  
Massa berkurang dengan  
40.643.000.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN  
berkurang dengan  
64.350.000.000,00

20.2 Subsektor ABRI  
berkurang dengan  
54.350.000.000,00

20.3 Subsektor Pendukung  
berkurang dengan  
10.000.000.000,00

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

(dalam rupiah)

PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG  
DIBIYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN  
KREDIT EKSPOR  
bertambah dengan  
10.791.000.000.000,00  
01 SEKTOR INDUSTRI  
bertambah dengan  
391.077.000.000,00  
01.1 Subsektor Industri  
bertambah dengan  
391.077.000.000,00  
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
bertambah dengan  
528.973.000.000,00  
02.1 Subsektor Pertanian  
bertambah dengan  
500.167.000.000,00  
02.2 Subsektor Kehutanan  
bertambah dengan  
28.806.000.000,00  
03 SEKTOR PENGAIRAN  
bertambah dengan  
971.014.000.000,00  
03.1 Subsektor Pengembangan  
Sumber Daya Air  
bertambah dengan  
544.083.000.000,00  
03.2 Subsektor Irigasi  
bertambah dengan  
426.931.000.000,00  
04 SEKTOR TENAGA KERJA  
bertambah dengan  
61.819.000.000,00  
04.1 Subsektor Tenaga Kerja  
bertambah dengan  
61.819.000.000,00  
05 SEKTOR PERDAGANGAN,  
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN  
KOPERASI  
bertambah dengan  
243.048.000.000,00  
05.1 Subsektor Perdagangan

	Dalam Negeri	
	bertambah dengan	
21.944.000.000,00		
	05.2 Subsektor	Perdagangan
Luar		
	Negeri	
	bertambah dengan	
67.927.000.000,00		
	05.3 Subsektor Pengembangan	
	Usaha Nasional	
	bertambah dengan	
11.489.000.000,00		
	05.4 Subsektor Keuangan	
	bertambah dengan	
83.399.000.000,00		
	05.5 Subsektor Koperasi dan	
	Pengusaha Kecil	
	bertambah dengan	
58.289.000.000,00		
06	SEKTOR TRANSPORTASI,	
	METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	
	bertambah dengan	
3.224.441.000.000,00		
	06.1 Subsektor Prasarana	
	Jalan	
	bertambah dengan	
1.287.717.000.000,00		
	06.2 Subsektor Transportasi	
	Darat	
	bertambah dengan	
1.100.119.000.000,00		
	06.3 Subsektor Transportasi	
	Laut	
	bertambah dengan	
489.878.000.000,00		
	06.4 Subsektor Transportasi	
	Udara	
	bertambah dengan	
320.097.000.000,00		
	06.5 Subsektor Meteorologi,	
	Geofisika, Pencarian dan	
	Penyelamatan (SAR)	
	bertambah dengan	
26.630.000.000,00		
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
	bertambah dengan	
2.393.048.000.000,00		
	07.2 Subsektor Energi	
	bertambah dengan	
2.393.048.000.000,00		
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN	

	TELEKOMUNIKASI			
	bertambah dengan			
705.882.000.000,00	08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi			
	bertambah dengan			
705.882.000.000,00				
	09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI			
	bertambah dengan			
169.994.000.000,00	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah			
	bertambah dengan			
167.812.000.000,00	09.2 Subsektor			Transmigrasi
dan	Pemukiman Perambah Hutan			
	bertambah dengan			
2.182.000.000,00				
	10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG			
	bertambah dengan			
42.476.000.000,00	10.1 Subsektor			Lingkungan
Hidup	bertambah dengan			
26.249.000.000,00	10.2 Subsektor Tata Ruang			
	bertambah dengan			
16.227.000.000,00				
	11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA			
	ESA,			PEMUDA
DAN	OLAH RAGA			
	bertambah dengan			
488.160.000.000,00	11.1 Subsektor Pendidikan			
	bertambah dengan			
472.765.000.000,00	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan			
	bertambah dengan			
15.395.000.000,00				
	12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA			
	bertambah dengan			
6.424.000.000,00				

	12.1 Subsektor		Kependudukan
dan	Keluarga Berencana bertambah dengan		
	6.424.000.000,00		
	13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA		
	berkurang dengan		
	215.233.000.000,00		
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial		
	bertambah dengan		
	40.780.000.000,00		
	13.2 Subsektor Kesehatan		
	bertambah dengan		
	171.490.000.000,00		
	13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja		
	bertambah dengan		
	2.963.000.000,00		
	14 SEKTOR PERUMAHAN		DAN
PERMUKIMAN	bertambah dengan		
	905.499.000.000,00		
	14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman		
	bertambah dengan		
	888.113.000.000,00		
	14.2 Subsektor	Penataan	Kota
dan	Bangunan		
	bertambah dengan		
	17.386.000.000,00		
	15 SEKTOR AGAMA		
	bertambah dengan		
	15.133.000.000,00		
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama		
	bertambah dengan		
	15.133.000.000,00		
	16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI		
	bertambah dengan		
	88.333.000.000,00		
	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi		
	bertambah dengan		
	60.950.000.000,00		
	16.2 Subsektor		Ilmu

Pengetahuan	Terapan dan Dasar bertambah dengan		
	114.000.000,00		
	16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana	dan	Sarana
Iptek	bertambah dengan		
	19.774.000.000,00		
	16.4 Subsektor Kelautan bertambah dengan		
	6.094.000.000,00		
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan		
	1.087.000.000,00		
	16.6 Subsektor		Sistem
Informasi	dan Statistik bertambah dengan		
	314.000.000,00		
17	SEKTOR HUKUM bertambah dengan		
	274.000.000,00		
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional bertambah dengan		
	274.000.000,00		
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan		
	49.537.000.000,00		
	18.1 Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan		
	48.651.000.000,00		
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan		
	886.000.000,00		
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan		
	31.578.000.000,00		
	19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi	dan	Media
Massa	bertambah dengan		
	31.578.000.000,00		
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN		



bertambah dengan  
259.057.000.000,00  
20.2 Subsektor ABRI  
bertambah dengan  
259.057.000.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672) maupun Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3749